

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi perdagangan dan juga sistem perdagangan bebas saat ini adalah pekerjaan sektor swasta yang berkembang di banyak Negara non-industri. Kebangkitan sektor UMKM merupakan bagian yang signifikan dan memiliki peran besar dalam perputaran keuangan dan lapangan pekerjaan. Istilah UMKM mengacu pada kegiatan usaha yang dibentuk oleh masyarakat, baik sebagai usaha perorangan maupun badan usaha (Wilantara, 2016).

UMKM berperan penting dalam penciptaan pekerjaan, menambah kontribusi pada pajak, impor dan ekspor, memfasilitasi distribusi untuk barang, pengembangan SDM, dan mendukung kemajuan bisnis. UMKM merupakan kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi negara di mana UMKM memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi karena mereka mempromosikan kewirausahaan dan memberikan kesempatan kerja selain berkontribusi dalam pendapatan ekspor dan pertumbuhan *inklusif*.

UMKM dapat mengatasi sebagian dari masalah ekonomi negara dengan memberikan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperuntukan kepada masyarakat, mengatasi masalah pengangguran, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM yakni kelompok usaha yang mempunyai jumlah terbesar dan terbukti kebal terhadap berbagai guncangan dari krisis ekonomi yang pernah terjadi.

Di Indonesia UMKM merupakan bagian penting dari kerangka sistem ekonomi Nasional, karena memiliki peran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui misi membuka usaha dan lapangan pekerjaan, meningkatkan gaji individu dan mengambil bagian dalam perdagangan devisa negara dan memperkuat perekonomian masyarakat. Kekuatan UMKM juga ditegaskan dengan kemampuan untuk memberikan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, kemiskinan atau memperluas kesenjangan antar pelaku usaha dan menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan produk barang-barang buatan lokal dengan Negara luar.

Ketika badai krisis melanda Indonesia, usaha skala kecil dan menengah sedikit siap untuk bertahan yang dibandingkan dengan perusahaan besar. Dimana sebagian besar unit usaha bersekala kecil kurang terlalu tunduk atau tergantung pada pinjaman atau modal yang sangat besar dan di luar mata uang asing. Dengan cara ini, ketika ada perubahan *standar konversi*, perusahaan skala besar yang pada umumnya mengatur dengan bentuk mata uang asing adalah yang berpotensi untuk menghadapi efek darurat krisis ekonomi.

Salah satu tujuan UMKM adalah untuk terus mengembangkan usahanya atau menumbuhkembangkan usaha untuk membangun perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa karena UMKM adalah alat perjuangan Nasional untuk mengembangkan dan membangun Perekonomian Nasional dengan memasukkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi yang dapat diharapkan dapat membangun perekonomian Nasional agar terus menjadi lebih baik dengan mengandalkan potensi yang di miliki masyarakat.

UMKM merupakan peluang bisnis yang secara tegas diberdayakan oleh pemerintahan dengan alasan semakin *inovatif* jaringan yang ada dengan masyarakat yang banyak berwirausaha, maka semakin baik perekonomian suatu daerah dengan alasan sumber daya yang dekat, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat diserap dan bermanfaat secara optimal. Dengan demikian, kita tidak bisa menganggap remeh UMKM. UMKM menjadi faktor utama bagi masyarakat karena mampu memberikan pendapatan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan mampu berperan aktif dalam mengikuti perkembangan ekonomi. Apalagi UMKM juga merupakan bidang usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran dan memberi bantuan pemerintah daerah setempat. UMKM merupakan pelaku usaha yang disibukkan dengan berbagai kegiatan usaha. Secara moneter, pelaku UMKM memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara dalam arti menambah penciptaan lapangan kerja dan PDB (Produk Domestik Bruto).

Saat ini kemajuan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan dalam menghadapi dunia usaha yang tak terhindarkan. Meskipun demikian, dengan berbagai kendala yang ada, UMKM masih diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam perkembangan UMKM, hambatan dan rintangan yang dihadapi pelaku UMKM antara lain ketiadaan modal, baik dalam jumlah maupun sumbernya, ketiadaan kapasitas administrasi, ketrampilan kerja, dan rendahnya daya guna atau produktivitas. Hal ini membuat kesenjangan yang lebar antara pelaku usaha, pemasaran yang terbatas (Susila, 2017).

Selain hal-hal ini, ada juga persaingan yang kurang sehat yang mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas maka dari itu upaya untuk lebih mengembangkan kinerjanya cenderung bersifat konvensional. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengetahuan manajemen dalam menentukan *item cost* (harga produk). Estimasi harga produk seringkali hanya ditempatkan pada kondisi umum dalam lingkungan industrinya dan tenaga kerja jarang dipertimbangkan. Oleh karena itu, mereka sering salah dalam memperkirakan produktivitas usaha yang pada akhirnya berdampak pada kinerja usaha.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dari sudut pandang keuangan dan perbankan untuk mencapai kondisi *makroekonomi* yang stabil dan *kondusif*. Namun, upaya tersebut harus juga dibarengi dengan upaya melibatkan usaha yang nyata, terutama melalui pengembangan UMKM. Hal ini mengingat UMKM merupakan salah satu pemain penting bagi Perekonomian Rakyat. Sementara itu, kemajuan UMKM masih dihadapkan pada salah satu hambatan dalam mengakses pembiayaan dan perbankan, khususnya keterbatasan data keuangan mengenai kemungkinan UMKM atau kelayakan usahanya. Untuk kegiatan dalam hal rangka meningkatkan penyaluran kredit UMKM. Bank misalnya, pada umumnya belum siap untuk mendapatkan informasi keuangan yang memadai dan UMKM tidak pernah berhubungan dengan bank, mengingat kendala atau kurang lengkap catatan keuangan UMKM tersebut. Ini tidak lengkap karena keunikan UMKM, yang sebagian besar tidak memiliki data yang terkoordinasi tentang kondisi keuangan, pangsa pasar, kompetisi dan jejak rekam manajemen. Disisi lain UMKM memiliki keterbatasan data tentang produk dan jasa bank yang sesuai dengan kebutuhan

moneter mereka. Demikian juga, ada juga persyaratan untuk informasi tentang prosedur dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai administrasi keuangan ini. Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI) memiliki berbagai strategi untuk pengembangan UMKM, terutama untuk memperluas penerimaan pembiayaan UMKM ke perbankan, sesuai kewenangan BI.

Tentang UU no. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, arah strategi BI sebagai Bank Nasional dalam menciptakan UMKM di masa yang akan datang dipusatkan pada “pengembangan lebih lanjut penerimaan UMKM ke perbankan”. Pengaturan sebenarnya tergantung pada kondisi dan masalah yang dilihat oleh UMKM hingga saat ini, khususnya pembatasan akses ke pembiayaan yang dengan demikian mempengaruhi penciptaan produksi dan pemasaran serta pendapatan. Ada tiga macam kesenjangan antara UMKM dan perbankan yang mempengaruhi keterbatasan akses pembiayaan tersebut, sehingga turut menghambat laju penyaluran Kredit Perbankan kepada UMKM, yaitu: kesenjangan skala yang terjadi karena ketidaksesuaian antara jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan dengan kebutuhan UMKM dan sebaliknya, kesenjangan formal yaitu kesenjangan yang terjadi karena keterbatasan UMKM dalam memenuhi keperluan formal bank, misalnya izin usaha, kepastian sebagai pengesahan tanah atau NPWP dan kesenjangan informasi, lebih spesifiknya kesenjangan antara apa yang menjadi prasyarat dan cara bank dengan apa yang diketahui UMKM secara keseluruhan.

Di tengah kendala tersebut, UMKM dituntut untuk terus berkreasi dengan memanfaatkan daya *imajinatif* dan *inventifnya*. Oleh karena itu, penting untuk membangun kemampuan dan permodalan UMKM, guna memperluas keseriusan UMKM dan barang-barangnya untuk bersaing baik di iklim lokal maupun global. Selain itu, upaya ini dapat berjalan dengan baik dengan koordinasi yang baik antara kementerian, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan.

Usaha strategi yang dilakukan BI, lebih spesifiknya “mendesak bank pembiayaan UMKM” dilakukan dengan terus berupaya menghubungkan UMKM dan perbankan dengan tujuan akhir untuk membangun *akseptasi* pembiayaan UMKM kepada perbankan. Peran BI saat ini mengarah pada *promotional role* bagi UMKM yang dikaitkan dengan tugas utama BI untuk memelihara kestabilan nilai tukar rupiah melalui peningkatan kapasitas ekonomi. Hingga saat ini, BI melakukan kegiatan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM, yang selanjutnya diharapkan dapat menimbulkan ketertarikan perbankan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan. Peran BI ini diarahkan baik pada sisi permintaan (*demand*) maupun penyedia (*supply*).

Dari sisi *supply*, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM. Salah satunya dengan memberikan pedoman keuangan yang membantu peredaran uang muka bank atau penyaluran kredit perbankan dan memperkuat organisasi pendukung melalui perbaikan kerangka moneter, untuk membangun penerimaan UMKM terhadap kredit perbankan. Sementara dari sisi *demand* untuk mengembangkan *kualifikasi* dan kemampuan dibantu melalui eksplorasi, penyiapan atau pemberian bantuan khusus dan pemberian data atau informasi. Manfaatnya untuk menegaskan bahwa

UMKM dapat memberi lapangan kerja, juga menjadi sumber pendapatan bagi rakyat banyak, sementara pelatihan dan bantuan teknis adalah untuk memberi pengetahuan, bahwa siapa saja dapat berbisnis dengan skala mikro, dimana dalam hal ini Bank Indonesia bisa membantu, terutama dalam upaya peningkatan akses kepada perbankan agar UMKM dapat lebih berkembang. Sedangkan penyediaan informasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mengembangkan UMKM. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan agar UMKM lebih bisa mengembangkan produknya menjadi lebih baik serta diterima di pasar Domestik dan Internasional.

Menjadi suatu tonggak ekonomi kerakyatan, UMKM mampu menjalankan usaha yang telah dilakukan mereka sebagai pelaku usaha secara penuh kehati-hatian agar pelaku usaha dapat selamat dari dampak krisis ekonomi. Para pelaku UMKM tidak memakai modal pinjaman yang secara besar-besaran justru apabila terpaksa harus melakukan peminjaman dari bank jumlahnya pun relatif begitu kecil tidak terlalu besar sehingga apabila terjadi goncangan pada bidang moneter tidak sampai mematikan usahanya. Demikian juga pada krisis perekonomian yang terjadi tidak menghancurkan sendi-sendi dalam usaha UMKM, karena UMKM berdiri dan tidak tergantung pada bahan mentah mulai dari luar negeri atau impor dan sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan kurs valuta asing. Disisi lain sifat UMKM yang *elastis* dan mudah untuk beradaptasi maka seharusnya dalam program ekonominya pemerintah dapat memberikan perhatian yang cukup besar pada sektor UMKM yang dijadikan tonggak perekonomian kerakyatan. Data yang didapat dari Menteri Negara Koperasi dan UMK menunjukkan bahwa di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sekitar 783.132 unit perusahaan mandiri dan

60.702 usaha menengah yang mampu mempertahankan 117 juta tenaga kerja, angka ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2017 sekitar 116,4 juta orang (Dinas Koperasi dan UMKM) diolah dari informasi atau data BPS.

Sebagai andalan perekonomian individu, UMKM dapat dirasakan dimana saja baik berada dalam kota-kota besar maupun berada di kota-kota kecil, banyak dari pedagang dan pengusaha kecil yang aktif mendapatkan bagian dalam kehidupan ekonomi. Contoh umum banyaknya penjual makanan yang berjualan di sepanjang jalan ataupun juga restoran-restoran atau warung-warung makan yang ada dan dapat dijumpai di kota-kota tersebut. Mereka adalah rakyat biasa yang ikut serta dalam menumbuhkan perekonomian Negara Indonesia sehingga Perekonomian Negara kita menjadi acuan ekonomi kerakyatan yang diharapkan menjadi panutan yang sukses dalam suatu sistem Perekonomian Indonesia (Suharyanto, 2016).

Sebagai usaha yang serius bekerja, UMKM dapat mempekerjakan banyak tenaga kerja, baik yang berbakat maupun yang tidak kompeten. Dengan demikian, UMKM belum memiliki pilihan untuk memberikan kerangka upah yang memadai sesuai dengan upah minimum Regional atau Provinsi, tetapi diharapkan UMKM selalu terus bersaing berikut adalah jumlah UMKM yang berada di Provinsi Jambi yang di harapkan Jumlah UMKM akan terus mengalami peningkatan. Berikut adalah Jumlah UMKM Provinsi Jambi lima tahun terakhir yaitu periode 2016-2020 dalam satuan Unit.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Provinsi Jambi Periode 2016-2020 (Unit)

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)	Perkembangan (%)
2016	98.105	-
2017	100.898	2,85
2018	104.155	3,23
2019	138.470	32,95
2020	72.126	-47,91

Sumber : BPS & Dinas koperasi dan UMKM, 2020

Pada tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa jumlah perkembangan UMKM dari tahun-ketahun selalu mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat dari lima tahun terakhir jumlah perkembangan UMKM di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sebesar 98.105 unit hingga 2019 sebesar 138.470 unit tetapi pada tahun 2020 jumlah perkembangan UMKM di Provinsi Jambi mengalami penurunan yang signifikan dengan jumlah sebesar 72.126 unit hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pandemi Covid-19 sudah mulai menyebar di seluruh Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi yang mengalami penurunan 47,91 persen dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui pemerintah pada saat ini harus fokus dan peduli terhadap pengembangan UMKM melalul program-programnya, dan juga masih berupaya keras untuk mengatasi pandemi Covid-19 tersebut agar jumlah UMKM tidak terus mengalami penurunan atau mengalami gulung tikar, maka dari itu mengenai permasalahan ini pemerintah melalui pihak perbankan membantu dengan penyaluran Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi agar UMKM masih tetap bertahan di masa pandemi ini.

Adapun beberapa kemajuan yang mempengaruhi UMKM di Provinsi Jambi, khususnya Kredit Modal Kerja perbankan dan Kredit Investasi perbankan. Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan suatu usaha bank antara lain bertumpu

pada kemampuan dan kecukupan dalam mengawasi kredit dan mengendalikan resiko. Hubungan Kredit Investasi terhadap UMKM dapat digunakan untuk membangun atau memperluas kegiatan dalam usaha UMKMnya dan hubungan Kredit Modal Kerja terhadap UMKM digunakan untuk meningkatkan produksinya seperti pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan utama bank adalah memberikan kredit dimana pemberian ini mengandung resiko yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank dan kesehatan bank. Namun karena sebagai lembaga perantara, sebagian besar aset yang dimiliki bank berasal dari keuangan negara itu sendiri, sehingga pengaturan kredit perbankan dibatasi oleh pedoman dan undang-undang BI. UU Keuangan telah memerintahkan agar bank secara konsisten memegang teguh aturan kehati-hatian dalam menyelesaikan latihan bisnis mereka, mengingat untuk memberikan kredit. Selanjutnya, BI merupakan otoritas keuangan juga menetapkan pedoman pemberian kredit oleh bank (Institut Bankir Indonesia (IBI), 2018)

Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ataupun kebutuhan usahanya kredit dapat dianggap sebagai salah satu solusi keuangan yang terbaik bagi pelaku usaha yang kurang memiliki kemampuan secara *finansial*. Tetapi sebelum kredit itu diberikan, biasanya terlebih dulu bank akan melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah yang akan meminjam agar dalam membayar angsuran dan bunga setiap bulannya tidak terjadi kendala. Seperti namanya, kredit modal kerja adalah kredit yang diperoleh oleh individu atau pemegang hutang untuk memulai bisnis atau bisnis. Dan mengingat Kredit Investasi ini merupakan bagian angsuran dari struktur spekulasi dari Bank

Indonesia. Faktor pertama yaitu Kredit Modal Kerja yang mempengaruhi kinerja UMKM di Provinsi Jambi dapat dilihat lima tahun terakhir tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 1.2 Kredit Modal Kerja Perbankan Provinsi Jambi Periode 2016-2020
(Rp.Juta)

Tahun	Kredit Modal Kerja (Rp.Juta)	Perkembangan (%)
2016	11.903.451	-
2017	13.202.701	10,91
2018	16.185.099	22,59
2019	17.670.035	9,17
2020	19.820.523	12,17

Sumber : *Bank Indonesia, 2020*

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan Kredit Modal Kerja perbankan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar Rp. 16.185.099 atau tumbuh sebesar 22,59 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Kredit Modal Kerja itu mulai rendah pada tahun 2019 sebesar Rp. 17.670.035 atau hanya tumbuh sebesar 9,17 persen dan naik kembali pada tahun 2020 sebesar 19.820.523 atau tumbuh sebesar 12,17 persen. Sebelumnya, hal ini disebabkan oleh lemahnya minat Kredit Modal Kerja, meningkatnya sinisme terhadap perkembangan moneter dan terlebih lagi kekhususan bank dalam menawarkan Kredit Modal Kerja di tengah meningkatnya resiko kredit akibat pandemi virus corona.

Faktor yang selanjutnya adalah Kredit Investasi perbankan di Provinsi Jambi tahun 2016 sampai 2020 pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Kredit Investasi Perbankam Provinsi Jambi Periode 2016-2019
(Rp.Juta)

Tahun	Kredit Investasi (Rp.Juta)	Perkembangan (%)
2016	11.699.149	-
2017	11.379.909	-2,73
2018	12.159.395	6,85
2019	12.177.391	0,15
2020	12.672.965	4,07

Sumber : Bank Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan Kredit Investasi perbankan di Provinsi Jambi mengalami hasil peningkatan signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 sebesar Rp. 12.159.395 atau tumbuh 6,85 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Kredit Investasi itu mulai rendah pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.177.391 atau hanya tumbuh sebesar 0,15 persen dan naik kembali pada tahun 2020 sebesar 12.672.965 atau tumbuh sebesar 4,07 persen. Perlambatan tersebut disebabkan oleh ketidakberdayaan minat permintaan kredit seiring dengan berkembangnya pesimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan terlebih lagi bank-bank tertentu juga makin selektif dalam menyalurkan Uang Muka Modal Kerja di tengah persepsi yang tinggi akibat resiko pandemi virus corona dimana Kredit Investasi ini tidak terlalu jauh beda dengan yang dialami Kredit Modal Kerja karena adanya pandemi Covid-19.

Covid-19 ini sendiri terjadi pada tahun 2019, hingga saat tahun 2020 *masih berlanjut*, dan diprediksi wabah ini *masih terus berlanjut*. Bukan waktu yang singkat bagi masyarakat untuk melewati masa pandemi ini. Virus corona telah dinyatakan sebagai pandemi oleh World Wellbeing Association (WHO). Hal ini tak lepas dan tingginya sebaran orang yang dilaporkan terinfeksi virus ini, Menurut data yang dilansir dan *New York Times* dilaporkan bahwa sebanyak lebih

dari empat belas juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi virus ini di mana lebih dari enam ratus ribu di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

Tidak luput dari dunia perbankan potensi kemacetan kredit UMKM secara global sudah mulai menggejala sejak tahun 2019, penyebab utamanya adalah menurunnya produktivitas ekonomi dunia akibat penyebaran pandemi Covid-19. Bank-bank di Provinsi Jambi sedang bersiap untuk peningkatan keadaan dalam gagal bayar dan kredit macet ketika wabah Covid-19 memengaruhi konsumen dari dalam dunia bisnis. Berikut adalah kredit UMKM Provinsi Jambi sebelum dan saat Covid-19.

Tabel 1.4 Kredit UMKM Sebelum dan Saat Covid-19 Provinsi Jambi Periode 2016-2020 (Rp.Juta)

Keadaan	Tahun	Kredit UMKM (Rp.Juta)	Perkembangan (%)
Sebelum Covid-19	2016	10.755.169	-
	2017	12.329.541	14,64
	2018	15.185.713	23,17
	2019	16.706.781	10,02
Saat Covid-19	2020	16.449.046	-1,54

Sumber : Bank Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan kredit UMKM di Provinsi Jambi sebelum dan saat Covid-19 mengalami perbedaan yang signifikan, sebelum Covid-19 tepatnya pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sebesar Rp. 16.706.781 atau tumbuh 10,02 persen dari tahun sebelumnya. Lalu pada saat Covid-19 pertumbuhan kredit UMKM itu mulai rendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 16.449.046 atau hanya tumbuh sebesar 1,54 persen dari periode sebelumnya. Perlambatan tersebut disebabkan oleh ketidakberdayaan minat permintaan kredit Kredit Investasi sejalan *pesimisme* yang meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga makin *selektifnya* bank dalam penyaluran Kredit Modal Kerja

di tengah *persepsi* yang tinggi akibat resiko pandemi virus corona dimana Kredit Investasi ini tidak terlalu jauh beda dengan yang dialami Kredit Modal Kerja karena adanya pandemi Covid-19.

Mengingat klarifikasi atau penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Kredit Perbankan terhadap perkembangan UMKM sebelum dan saat pandemi Covid-19 dengan mengangkat peneliti yang berjudul “**Analisis Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Perkembangan UMKM Di Provinsi Jambi (Studi Sebelum Dan Saat Covid-19)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan kenyataan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan penyaluran kredit UMKM sebelum dan saat Covid-19?
2. Bagaimana perbedaan penyaluran kredit UMKM sebelum dan saat Covid-19?
3. Bagaimana pengaruh kredit perbankan terhadap perkembangan jumlah UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis perkembangan penyaluran kredit UMKM sebelum dan saat Covid-19.
2. Untuk menganalisis perbedaan penyaluran kredit UMKM sebelum dan saat Covid-19.
3. Untuk menganalisis pengaruh kredit perbankan terhadap perkembangan jumlah UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Praktisi

Sebagai acuan bahan masukan dalam menetapkan kebijakan terkait pemberian kredit perbankan dalam hal untuk melakukan perkembangan UMKM agar perekonomian berjalan semestinya baik sebelum, saat dan sesudah pandemi di Provinsi Jambi.

1.4.2 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan intuisi atau kontribusi bagi pemikiran guna menumbuhkan pengetahuan umum terkait cara berpikir ilmiah dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni dan diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dan menjadi bahan acuan referensi bagi penelitian selanjutnya.